

# TINJAUAN TERHADAP KELAYAKAN HARGA BERAS DI SUMATERA SELATAN

Yanter Hutapea, Triyandar Arif, Arifin Achmad, dan Tumarian Thamrin  
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan

## ABSTRAK

Harga jual beras haruslah layak agar petani dapat mengelola kelangsungan usahatani padi, yang berarti suatu harga di atas harga pokok produksinya. Tulisan ini membahas layak tidaknya harga beras yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2001 yang lalu di tiga agroekosistem yakni irigasi, lebak dan pasang surut. Lokasi kegiatan dilakukan di Desa Sido Makmur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Desa Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Desa Telang Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah sampel di masing-masing petani terdiri dari 40 petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya rata-rata untuk menghasilkan satu kg beras berturut-turut di Kabupaten OKU, OKI dan Kabupaten MUBA sebesar Rp 1.403,06 ; Rp 1.347,98 dan Rp 1.482,13. Harga jual beras di penggilingan pada masing-masing desa sebesar Rp 1.800/kg di Kabupaten OKI dan MUBA sedangkan di OKU Rp 2.000 /kg. Pendapatan usahatani di Kabupaten OKU sebesar Rp 1.691.585/ha, sedangkan di OKI dan MUBA masing-masing sebesar Rp 1.177.267/ha dan Rp 758.116,6/ha. Kisaran harga ambang bawah dan atas per kg beras berturut-turut di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA sebesar Rp 1.824 – Rp 2.525; Rp 1.752 – Rp 2.426; dan Rp 1.927 – Rp 2.668, dengan demikian harga pembelian beras yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2001 layak di tiga wilayah tersebut.

*Kata Kunci:* Harga beras, kelayakan

## PENDAHULUAN

Sebagai wilayah yang menduduki peringkat ketujuh dalam menghasilkan beras di Indonesia, Sumatera Selatan (Sumsel) diharapkan menjadi pemasok bahan pangan bagi provinsi lain. Hal ini didukung oleh keragaman agroekosistem sawah di Sumsel, dimana pada tahun 2001 luas panen padi sawah adalah 432.574 ha dan padi ladang adalah 72.765 ha dengan produksi padi sawah sebesar 1.532.092 ton dan padi ladang sebesar 152.568 ton (BPS Sumsel, 2002).

Fenomena ekonomi yang terjadi di saat panen raya tiba, dimana penawaran lebih besar dari permintaan, mengakibatkan jatuhnya harga padi walaupun jangka waktunya tidak panjang namun berdampak besar karena volume penjualan yang besar. Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 telah disusun kebijakan perberasan yang salah satu butirnya mengupayakan pengaturan pembelian gabah/beras melalui harga dasar pembelian oleh pemerintah (Bulog, 2002). Menurut Soekartawi (1993) kebijaksanaan pemerintah dalam merangsang peningkatan

produksi diklasifikasikan menjadi kebijaksanaan harga dan kebijaksanaan bukan harga. Masing-masing kebijaksanaan tersebut dapat dijalankan sendiri-sendiri tetapi kadang pula serempak dan bahkan saling berkaitan. Kebijaksanaan bukan harga biasanya diwujudkan dalam bentuk penunjang kebijaksanaan harga seperti pembuatan jalan, sarana transportasi dan lain-lain.

Harga jual haruslah layak diterima petani agar dapat mengelola kelangsungan usahatannya, yang berarti suatu harga di atas harga pokok produksinya. Untuk mengetahui harga pokok tersebut perlu diketahui besarnya biaya produksi (Soekartawi, 1993; Soe dan Fisher, 1993). Selanjutnya Soemarso (1990) menyatakan dalam menetapkan harga ditentukan berapa besar laba yang layak diterima petani tersebut.

Pada masa paceklik, harga akan meningkat karena stok yang sangat terbatas bahkan tidak sedikit petani yang kembali membeli beras. Terutama petani yang memiliki lahan sempit, dimana untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam satu musim tanam seringkali tidak mencukupi. Menyikapi hal tersebut disamping pemerintah menetapkan harga dasar pembelian

gabah/beras dan juga membangun sarana infrastruktur lain seperti pembuatan lumbung pangan masyarakat desa. Dengan membentuk lumbung pangan di sentra produksi padi diharapkan turunnya harga di saat panen tiba dapat diatasi sehingga posisi tawar petani tetap akan kuat karena beras yang disimpan di lumbung dapat dijual pada saat persediaan beras di pasaran menipis. Tulisan ini akan membahas layak tidaknya harga beras yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2001 yang lalu di tiga agroekosistem yakni irigasi, lebak dan pasang surut.

## BAHAN DAN METODA

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja, tempat berlangsungnya salah satu kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan peningkatan produksi padi yaitu pengembangan lumbung pangan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (MUBA). Disamping itu, ketiga kabupaten terpilih juga merupakan kabupaten penghasil beras terbanyak di Sumsel. Desa yang terpilih adalah Desa Sido Makmur (OKU), Desa Sirah Pulau Padang (OKI), dan Desa Telang Jaya (MUBA).

Sampel petani padi berjumlah 40 orang di masing-masing wilayah sehingga secara keseluruhan terkumpul sebanyak 120 petani. Data yang dikumpulkan adalah: data primer dan sekunder. Baik data runtun waktu maupun kerat lintang. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap aparat pemerintah, ketua kelompok tani, penyuluh lapangan tempat diimplementasi-kannya pengembangan lumbung pangan. Data primer meliputi identitas petani dan keluarga, penguasaan lahan, penggunaan sarana produksi, dan produksi yang dicapai. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait meliputi data: sumberdaya manusia (kependudukan, mata pencaharian), sumber daya alam (ketersediaan lahan).

Untuk menetapkan harga gabah/beras digunakan harga ambang bawah dan atas (Simatupang, 2001). Pada ambang bawah harga digunakan profitabilitas 30% sebagai acuan umum dalam analisis usahatani dengan rumus:

$$H_b = 1,30 BR$$

Dimana:

H<sub>b</sub> = ambang bawah rentang harga (Rp/kg)

BR = biaya produksi rata-rata (Rp/kg)

Sedangkan ambang atas harga ditetapkan dengan perkiraan suku bunga 20% per tahun dan margin 30 % maka petani dan pedagang masih terangsang untuk melakukan penyimpanan gabah/beras selama satu musim (6 bulan). Dengan demikian, ambang atas rentang harga adalah:

$$H_a = 1,80 BR$$

Dimana;

H<sub>a</sub> = ambang atas rentang harga (Rp/kg)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Harga Beras di Sumsel

Persoalan yang selalu muncul pada saat panen raya tiba adalah rendahnya harga gabah yang diterima petani. Selama ini pemerintah lebih peka terhadap kenaikan harga eceran beras dibanding terjadinya penurunan harga beras saat panen. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam tahun 2002 merencanakan melakukan pengadaan beras dalam negeri sebesar 2,2 juta ton, termasuk di dalamnya pengadaan untuk Sumatera Selatan sebesar 100 ribu ton dengan harga sesuai harga dasar pembelian pemerintah yaitu Rp 1.519/kg gabah kering giling dan Rp 2.470/kg beras. Diharapkan pada kondisi normal maka volume pembelian beras petani sebesar itu oleh pemerintah akan mampu mengangkat harga gabah di pasar. Ketersediaan stok beras menjadi salah satu cara untuk mengamankan harga beras dan menghindari lonjakan beras akibat kelangkaan beras. Pada saat panen raya pengadaan stok beras oleh Bulog sangat dibatasi oleh keterbatasan fasilitas gudang. Sehingga dalam prakteknya Bulog tidak banyak membantu petani dalam menjamin harga dasar beras bagi petani.

Bila dibandingkan dengan harga pembelian beras oleh Bulog yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2001 sebesar Rp 2.470/kg, ternyata pada tahun yang sama di beberapa ibukota kabupaten harga beras pada tingkat pedagang pengecernya (kualitas sedang) masih berada di bawah harga tersebut

yakni di Pangkal Pinang (Rp 2.396/kg), di Baturaja (Rp 2.385/kg), di Kayu Agung (Rp2.371/kg) di Muara Enim (Rp 2.379/kg), di Lubuk Linggau (Rp 2.271/kg), dan di Lahat (Rp 2.425/kg). Hal ini mengindikasikan bahwa harga jual beras di tingkat petani berdasarkan klasifikasi mutunya tentu jauh dibawah harga yang ditetapkan, karena di tingkat pedagang pengecer harganya di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2002, harga pembelian beras oleh Bulog Rp 2.470/kg (mutu III) dan Rp 2.430/kg (mutu IV), di ibukota kabupaten memperlihatkan harga yang sudah berada di atas harga tersebut. Namun harga tersebut adalah di tingkat pengecer. Dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi harga jual beras seperti diperlihatkan oleh Tabel 1.

Perkembangan harga eceran beras di tingkat konsumen relatif konstan. Ini diperlihatkan oleh data harga eceran beras di tingkat konsumen di kota Palembang, Baturaja, Kayu Agung dan Sekayu pada Tabel 2.

Dalam kaitannya dengan pengembangan lumbung pangan akhir-akhir ini maka rincian harga bulanan tersebut tentunya sudah menunjukkan bahwa harga belum merupakan suatu hal yang menarik bagi petani untuk melakukan kegiatan tunda jual karena harga pada saat menyimpan dengan harga di saat menjual relatif sama.

Tabel 1. Perkembangan Harga Eceran Rata-rata Beras Kualitas Sedang (Rp/kg) di Beberapa Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1998- 2002.

Tahun	Palem- bang	Baturaja	Kayu Agung	Sekayu
1998	1.920	2.174	1.863	2.009
1999	2.567	2.387	2.339	2.420
2000	2.427	2.800	2.195	2.108
2001	2.487	2.385	2.370	2.706
2002	3.171	2.600	2.613	2.850

Sumber: BPS Sumatera Selatan (berbagai tahun)

#### Analisis Usahatani dan Harga Beras

Dari tiga desa yang mewakili tiga agroekosistem masing-masing memiliki keragaan usahatani padi tersendiri. Di Kabupaten OKI cukup banyak ditemukan rumah tangga petani yang menyewa lahan sawah orang lain yakni 35%, namun sebaliknya hampir tidak ada responden yang menyewa lahan sawah di kabupaten MUBA (2,5%), sedangkan di Kabupaten OKU sebanyak 12,5%. Dari segi penggunaan sarana produksi, di Kabupaten OKI jarang sekali petani menggunakan pupuk, namun sebaliknya di Kabupaten OKU dan MUBA. Di Kabupaten OKU petani menanam padi dua kali dalam 12 bulan sedangkan di Kabupaten OKI dan MUBA hanya satu kali saja, sehingga luas panen padi rata-rata rumah tangga petani (termasuk yang disewa) berdasarkan hasil survei menjadi 1,5 ha di Kabupaten OKU; 0,93 ha di Kabupaten OKI dan 2,21 ha di Kabupaten MUBA. Hal tersebut tentunya juga mempengaruhi variasi besarnya biaya yang dikeluarkan.

Tabel 2. Harga Eceran Rata-rata Beras Kualitas Sedang (Rp/Kg) Bulanan di Beberapa Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001 dan 2002.

Bulan	2001				2002			
	Palembang	Baturaja	Kayu Agung	Sekayu	Palembang	Baturaja	Kayu Agung	Sekayu
Januari	2.550	2.300	2.250	2.600	3.400	3.300	3.200	3.000
Pebruari	2.550	2.400	2.300	2.700	3.200	2.800	2.700	2.800
Maret	2.625	2.425	2.500	2.700	3.150	2.500	2.500	2.800
April	2.600	2.125	2.400	2.700	3.150	2.500	2.500	2.800
Mei	2.625	2.100	2.400	2.600	3.150	2.500	2.650	2.800
Juni	2.625	2.100	2.250	2.600	3.100	2.500	2.650	2.800
Juli	2.625	2.100	2.250	2.600	3.150	2.500	2.650	2.800
Agustus	2.625	2.200	2.300	2.700	3.150	2.500	2.650	2.800
Sept	2.725	2.200	2.300	2.700	3.100	2.500	2.650	2.800
Oktober	2.750	2.650	2.300	2.775	3.100	2.500	2.400	2.800
Nov	2.750	2.700	2.500	2.900	3.200	2.500	2.400	3.000
Des	3.200	2.700	2.700	2.900	3.200	2.600	2.400	3.000

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (berbagai tahun)

Rata-rata pemilikan sawah di Kabupaten OKU seluas 0,69 ha dengan kisaran 0,18–2 ha, di Kabupaten OKI seluas 0,62 Ha dengan kisaran 0,5–1,5 ha, sedangkan di Kabupaten MUBA rata-rata seluas 2,18 ha dengan kisaran 1–4 ha. Petani di Kabupaten OKU dan MUBA adalah transmigran sedangkan di Kabupaten OKI adalah penduduk asli setempat. Biaya variabel pada analisis ini meliputi biaya untuk pembelian benih, pupuk, pestisida, karung dan upah tenaga kerja baik prapanen (pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengendalian hama/penyakit/gulma, panen/merontok, pengangkutan maupun pasca panen (menjemur & penggilingan). Sedangkan Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan alat, pajak sawah, iuran air, sumbangan lain yang terkait dengan usahatani padi, biaya sewa dan bunga atas modal yang dalam hal ini diperhitungkan 20% per tahun terhadap biaya variabel.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa biaya total usahatani padi di Kabupaten OKU sebesar Rp 3.751.720/ha sedangkan di OKI sebesar Rp 2.862.178/ha dan Rp 3.354.966/ha di MUBA. Biaya rata-rata untuk menghasilkan satu kg beras berturut-turut di Kabupaten OKU, OKI dan Kabupaten MUBA sebesar Rp 1.403,06 ; Rp 1.347,98 dan Rp 1.482,13. Biaya rata-rata ini menunjukkan harga pokok atau titik impas harga/kg beras. Produksi beras di Kabupaten OKU sebesar 2.721,65 kg/ha, di OKI sebesar 2.379,53 kg/ha sedangkan di MUBA 2.285,04 kg/ha. Harga jual beras di penggilingan berdasarkan hasil wawancara sebesar Rp 1.800/kg di Kabupaten OKI dan MUBA sedangkan di OKU Rp 2.000 /kg. Pendapatan usahatani di Kabupaten OKU sebesar Rp 1.691.585/ha, sedangkan di OKI dan MUBA masing-masing sebesar Rp 1.177.267/ha dan Rp 758.116,6/ha.

Ditinjau dari kualitasnya memang beras di tingkat petani belum memenuhi syarat dimana butir gabah, butir patah, butir menir melebihi standar maximum yang ditetapkan. Namun dikaitkan dengan harga yang berlaku

di tingkat petani yakni harga jual beras di penggilingan, maka harga ini memang jauh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Bila ditinjau harga pokok atau biaya rata-rata untuk menghasilkan satu kg beras masing-masing di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA sebesar Rp 1.403,06 ; Rp 1.347,98 dan Rp 1.482,13, menghasilkan kisaran harga ambang bawah dan ambang atas per kg beras di kabupaten OKU sebesar Rp 1.823,98–2.525,52; di Kabupaten OKI dengan kisaran Rp 1.752,37–2.426,36 dan di Kabupaten MUBA dengan kisaran Rp 1.926,77–2.667,83. Untuk Kabupaten OKU dan OKI harga jual beras dipenggilingan tersebut sudah layak dengan tingkat kualitas yang ada karena harga jualnya berada di atas harga ambang bawahnya. Namun harga jual beras Rp 1.800 /kg di penggilingan Kabupaten MUBA ternyata lebih rendah dari harga ambang bawah yang besarnya Rp 1.926,77/kg, dengan demikian harga yang berlaku di Kabupaten MUBA belum layak. Pada harga ambang bawah ditetapkan profitabilitas 30 % di atas harga pokok. Patokan ini merupakan acuan umum yang digunakan dalam analisis usahatani. Sedangkan pada harga ambang atas ditetapkan harga 80 % di atas harga pokok.

Penghitungan harga ambang bawah dan ambang atas beras per kg (data tahun 2001) di Kab. OKU sebesar Rp 1.824–2.525; di Kab. OKI sebesar Rp 1.752–2.426 dan di Kab. MUBA sebesar Rp 1.927–2.668. Dengan demikian harga pembelian beras oleh pemerintah sebesar Rp 2.470/kg layak untuk ketiga wilayah tersebut. Namun untuk harga beras yang berlaku pada tingkat petani perlu mendapat perhatian karena di Kab. MUBA berdasarkan hasil survey sebesar Rp 1.800/kg. Inpres penetapan harga pembelian beras oleh pemerintah yang lebih tinggi dari harga hasil analisis akan menyebabkan pertumbuhan produksi beras yang tinggi di Sumatera Selatan dengan ketentuan jika Bulog melakukan pembelian pada saat panen raya.

Tabel 3. Analisis Usahatani Padi/ha di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA Tahun 2001.

Uraian	OKU	OKI	MUBA
Biaya Variabel (Rp)	3.304.382,00	2.579.554,0	3.061.909
Biaya Tetap (Rp)	447.337,70	526.347,3	293.057
Biaya Total (Rp)	3.751720,00	2.862.178	3.354.966
Biaya Rata-Rata (Rp/kg)	1.403,06	1.347,98	1.482,13
Biaya Variabel Rata-Rata (Rp/kg)	1.239,55	1.128,31	1.352,56
Produksi Beras (kg)	2.721,65	2.379,53	2.285,04
Harga Beras (Rp/kg)	2.000,00	1.800,00	1.800,00
Penerimaan (Rp)	5.443.305	4.283.169	4.113.082
Pendapatan (Rp)	1.691.585	1.177.267	758.116,6
Harga Ambang Bawah (Rp/kg)	1.823,98	1.752,37	1.926,77
Harga Ambang Atas (Rp/kg)	2.525,52	2.426,36	2.667,83

Sumber: Hasil Penelitian Diolah

Harga mengambang ini perlu dievaluasi setiap sebelum musim panen untuk menetapkan harga beras di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga ambang atas dan bawah antar kabupaten berbeda karena biaya sarana produksi dan upah di berbagai kabupaten tidak sama. Sehingga dapat saja terjadi perbedaan harga jual antara kabupaten yang satu dengan yang lainnya meskipun dalam provinsi yang sama.

Dengan harga yang mengambang diharapkan petani tetap eksis mengusahakan padinya, bahkan bergairah untuk melakukan penyimpanan sampai musim tanam berikutnya. Sehingga dapat dicegah penurunan harga drastis yang biasa terjadi di tingkat petani pada saat panen raya. Hal ini tentunya berkaitan dengan adanya fasilitas (gudang) yang mampu menyimpan gabah.

### KESIMPULAN

1. Biaya rata-rata untuk menghasilkan satu kg beras tahun 2001 berturut-turut di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA adalah sebesar Rp 1.403,06,-; Rp 1.347,98,- dan Rp 1.482,13,-.
2. Pendapatan usahatani di Kabupaten OKU sebesar Rp 1.691.585,-/ha, sedangkan di OKI dan MUBA masing-masing sebesar Rp 1.177.267,-/ha dan Rp 758.116,6,-/ha.

3. Kisaran harga ambang bawah dan atas per kg beras berturut-turut di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA sebesar Rp 1.824,- - 2.525,-; Rp 1.752,- - 2.426,-; Rp 1.927,- - 2.668,-. Dengan demikian harga beras yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2001 tersebut telah layak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bulog. 2002. Pedoman Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri dan Giling Gabah Tahun 2002. Bulog. Jakarta.
- Simatupang, P. 2001. Kebijakan Harga Gabah Mengambang Terkendali Sebagai Opsi Pengganti Harga Dasar Gabah. *Dalam* Bunga Rampai Ekonomi Beras. A. Suryana dan S. Mardianto (Editor). Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekartawi. 1993. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemarso. 1990. Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Soc. T dan Fisher, B.S. 1993. Analisa Ekonomi Kebijakan Harga Beras Burma. *Dalam* Transisi Ekonomi 1990-An. Tantangan dan Dilema Myanmar. M. Than dan J.L.H. Tan (Editor). LP3ES. Jakarta.